KETERLIBATAN TOKOH MELAYU DALAM PILKADA DI KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN

Darmawan Z
darmawanzainal2@gmail.com
UIN Raden Fatah Palembang

Abstract: This article discusses the involvement of Malay figures in regional elections of 2018 in the city of Palembang. The character will play a crucial role in winning the fight among the political parties in the city of Palembang, the traditional factors and local figures have a role to play. Meanwhile the traditional leaders and religious leaders, have their own influence for society. A figureof the Malay community is a person of influence and respect by the people for the wealth of their knowledge. The role of Malay cultural figures in the electability of the future regional chief in Palembang City, many clerics as well as community figures are known to both a successful team and a key proponent of each pair of future mayoral/ deputy mayor of Palembang City. The Local politics is increasingly developing as a snowball that may influence the political system in Palembang City

Keywords: *Malay Figure, Pilkada, Palembang City*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang keterlibatan tokoh Melayu dalam pemilihan kepala daerah 2018 di Kota Palembang. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan diantara partai politik di kota Palembang, faktor adat dan tokoh lokal cukup berperan. Sementara tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Tokoh masyarakat melayu merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Peran keterlibatan tokoh budaya Melayu terhadap elektabilitas calon Kepala Daerah di Kota Palembang, diketahui banyak para tokoh ulama maupun tokoh masyarakat yang dijadikan tim sukses maupun pendukung utama dari tiap-tiap pasangan calon walikota/wakil walikota Palembang. Politik lokal kian berkembang sebagai kekuatan bak bola salju yang kian lama kian berkembang sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi sistem perpolitikan di Kota Palembang.

Kata Kunci: *Tokoh Melayu, Pilkada, Kota Palembang*

Pendahuluan

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elit vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. Kedudukan kepala daerah sebelumnya,

yakni pada masa rezim orla dan orba ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, namun kini masyarakat Indonesia dapat secara langsung memilih pemimpin daerahnya.[1]

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam penyelengaraan PILKADA. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik.[2]

Sementara menurut Bambang Purwoko menjelaskan bahwa: "Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyrakat untuk menduduki jabatan publik, juga berati adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan".[3]

Dengan demikian adanya Pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Otonomi Daerah memberikan konsekuensi yang logis kepada masyarakat untuk aktif dalam proses politik. Jika dahulu, pemimpin daerah akan dipilih oleh DPR maka sekarang rakyat langsung yang memilih kepala daerah mereka untuk lima tahun ke depan. Kesalahan dalam memilih akan berdampak kepada kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi hal yang penting. Rakyat diharapkan aktif dalam mencari informasi tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Seperti yang dikatakan oleh Agustino bahwa keberhasilan sistem demokrasi di suatu negara sangat ditentukan oleh partisipasi dari masyarakatnya, dan tatanan negara yang baik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat lokal.[4]

Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak pada proses politik itu sendiri karena masyarakat akan menjadi lebih 'melek politik' dan tidak mudah termakan bujuk rayu calon pemimpin mereka.Praktik pemilihan Kepala Daerah secara langsung memiliki artikulasi lokal di berbagai daerah, sebagaimana terjadi di Kota Palembang Sumatra Selatan.[5]

---

[1]Amrianto, " Peranan Elit Tradisional dalam Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014" https://media.neliti.com/media/publications/1145-ID-peranan-elit-tradisional-dalam-dinamika-politik-lokal-pada-pemilihan-kepala-daer.pdf, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

Islam kemudian tidak hanya dipandang hanya sebagai agama saja tetapi seolah menjadi basis politik yang kemudian disematkan pada etnis Melayu Palembang, yang notabenenya adalah muslim. Etnis Melayu, kemudian menjadi penting dalam perpolitikan di Palembang sehingga keterlibatan tokoh Melayu Palembang memiliki andil yang cukup besar bagi kemenangan calon pemimpin Palembang di masa depan. Ini dikarenakan tokoh Melayu dianggap sebagai seseorang yang mendapat apresiasi dari masyarakat karena ilmunya, kedudukannya, kedermawanannya, aktivitas dan pengabdiannya yang diabdikan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.[6]

Agama, budaya, serta politik senyatanya adalah entitas yang harus berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, seperti kasus di Kota Palembang, agama dan budaya dicampuradukkan dengan urusan politik. Padahal agama mengurusi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, budaya mengurusi nilai dan norma dalam masyarakat, dan politik berurusan dengan masalah kekuasaan. Ketika agama dan etnis sudah bercampur dengan urusan politik maka politik itu akan menghancurkan nilai-nilai kebudayaan dalam suatu masyarakat untuk mendukung penguasa-penguasa terpilih.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruang yang luas atau di tengah-tengah masyarakat. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya tentang keterlibatan tokoh Melayu Islam dalam politik pemilihan Kepala Daerah di kota Palembang, dan melakukan analisis secara mendalam terhadap persoalan terkait sehingga ditemukan data dan gagasan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini.

Data dari penelitian ini diambil dari berbagai macam informan dan dokumen, adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah tokoh-tokoh Melayu dan juga beberapa tokoh lainnya dapat ditelusur melalui tulisan berupa document. Selanjutnya peneliti akan menindaklanjuti informasi dari sumber data tersebut dengan mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang berkenaan dengan topic yang peneliti susun.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan ketiganya. Penelitian ini menggunakan ketiga teknik tersebut, akan tetapi yang lebih utama adalah teknik wawancara mendalam karena teknik ini dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik suatu fenomena yang nampak. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi digunakan untuk membantu, memperkaya, dan melengkapi data penelitian.

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data. Penelitian kualitatif dilakukan:

1. Analisis selama pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahap model air yaitu produksi data dan selanjutnya membuat kode serta mengembangkan proposisi sehingga memperoleh kesimpulan.
2. Analisis dalam situs artinya peneliti membuat bagan-bagan dalam martiks daftar masalah yang tertata berdasarkan waktu, keadaan, yang pada akhimya melakukan verifikasi jaringan kasual untuk menguji predeksi.
3. Analisis lintas situs artinya mengurutkan

[2]Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. (Yogyakarta: PustakaPelajar:LP3M,2005), hlm. 2

[3]Purwoko, TransisiMenuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian. (terj.), (Jakarta:LP3ES, 2003), hlm. 81

[4]ibid

[5]http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id

[7]http://mujahidinmudaa.blogspot.com/2014/04/sistem-politik-ekonomi-dan-sistem.html

substansi masalah dalam tabel ringkasan yang selanjutnya menyajikan bagan pencari lintas situs waktu dan setiap peristiwa.

Pembahasan

1. Keterlibatan Tokoh Melayu Dalam Pilkada

Masalah Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal.

Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.[7]

Pada masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di daerahnya.

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat Kota Palembang dewasa ini menurut pengamatan penulis dilapangan yaitu cundrung menciptakan kembali ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan. Namun, pilkada kota Palembang dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya.

Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kecamatan Kertapati Kota Palembang, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. Pilkada Walikota dan Wakil Walikota yang berlangsung di Kota Palembang, ini menarik untuk dicermati karena eksistensi tokoh masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat juga merupakan bagian dari partisipasi politik, ternyata dapat memberikan kembali ruang-ruang etnisitas untuk tumbuh subur di masyarakat.[8]

Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di daerah lain khususnya tetangga kota Palembang, tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal. Disisi lain, bagi tokoh budaya di Palembang, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental.

Menurut Tokoh budaya dan ulama yang sekaligus sebagai ketua MUI Kota Palembang Ustadz Saim Marhadan.[9] bahwa faktor-faktor politik semacam ini secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial di ranah politik. Me-

lihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berlangsung di Kota Palembang, tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya.

"Perubahan yang berlangsung, sejalan dengan diturunkannya Soeharto dari panggung politik, telah mendorong suatu perubahan signifikan dalam konfigurasi politik. Karena itu perubahan yang terjadi saat ini dipandang sebagai suatu langkah baru menuju terciptanya Indonesia baru di massa depan dengan dasar-dasar efisiensi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tuntutan reformasi itu sendiri datangnya dari dua arah, yaitu secara internal dan secara eksternal sebagai bagian dari masyarakat global".[10]

"Menurut Ketua Panwaslu Kota Palembang M. Taufik, bahwa secara intern tuntutan reformasi muncul akibat terjadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang mudah diperoleh. Kondisi ini telah menyebabkan masyarakat makin kritis.Dalam mencermati pengelolaan kekuasaan negara yang telah dianggap telah menyimpang dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. masyarakat mulai berani menyatakan sikap dan mengungkapkan berbagai penyelewengan yang ada".[11]

Semua ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat. Pilihan demokrasi menjadi pilihan wajib kegiatan berdasarkan pertimbangan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokratisasi itu sendiri sedang berlangsung di indonesia. Dimana saluran-saluran yang dulunya dianggap menghambat demokratisasi telah dibuka secara lebar.

Menurut penulis ada beberapa aspek substansial yang telah mengalami perubahan antara lain adalah pergeseran sistem kepartaian. Pada massa orde baru kita menganut sistem multi partai yang oleh beberapa kalangan dianggap merupakan sistem kepartaian yang semu, karena dalam kenyataannya hanya satu partai saja yang selalu mendominasi perolehan suara dalam setiap pemilu. Pada massa reformasi ini kita menerapkan sistem multi partai yang murni.

Demikian halnya dengan sistem pemilu yang telah mengalami penyempurnaan, dimana saat ini telah mengggunakan sistem proporsional daftar terbuka dimana sistem ini lebih memberikan kebebasan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik pemerintah itu sendiri. Selain itu pula sekarang ini telah dilaksanakan pemilihan umum secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan pada pemerintahan menggunakan sistem demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950.Pada waktu itu puluhan partai dan perorangan turut sebagai kontestan pemilu, dan akhirnya memang tidak ada kontestan yang memperoleh suara mayoritas. Dan disinilah kelemahan sistem demokrasi liberal, pemerintah akan mudah jatuh kalau tidak di dukung oleh partai dengan suara mayoritas. Terlepas dari hasil pemilu 1955 yang tidak mampu menghadirkan sebuah partai dengan suara mayoritas dan kemudian kita tahu, konstituante yang baru menggantikan UUDS 1950, pemilu 1955 adalah contoh pelaksanaan pemilu yang sangat fair.Pemilu 1955 telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia, kegagalan-maupun keberhasilannya.

Proses transformasi politik yang diawali dengan runtuhnya rezim otoritarian menuju tatanan

---

[7]Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001, hlm. 99.

[8]http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id

[9]Hasil wawancara dengan Ustadz Saim Marhadan sebagai seorang tokoh agama dan sekaligus ketua MUI Kota Palembang, di Palembang pada Maret 2018

[10]https://www.neliti.com/publications/1015/evaluasi-peran-tokoh-masyarakat-terhadap-partisipasi-politik-pada-pemilihan-bupa

politik yang demokratis merupakan suatu perubahan yang sangat mendasar. Demokrasi dimaksudkan sebagai upaya membangun struktur dan sistem serta pengelolaan kekuasaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.Hal ini diawali dengan pemilu 1999. Namun penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999 tidak segera dapat menyelesaikan persoalan bangsa. Hal ini disebabkan oleh karena kehidupan politik selama kurang lebih empat belas tahun terakhir ini, perilaku elit politik sangat berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok.

Sempitnya, peran mereka jauh dari empati terhadap penderitaan dan kepentingan masyarakat. Wilayah politik yang seharusnya menjadi tempat dimana para elit bertanding merebut dukungan rakyat dengan menawarkan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada kepentingan umum, hanya menjadi ajang perburuan kekuasaan yang didominasi oleh intrik dan akrobat politik yang mengabaikan norma dan etik serta komitmen kepada kepentingan rakyat.

Proses pemilihan Walikota dan wakil walikota tahun 2014 yang berlangsung di Kota Palembang, membawa peran serta tokoh masyarakat lokal dalam pergulatan politik yang sedang menuju babak baru yakni politik identitas. Merespon kebijakan desentralisasi yang dewasa ini telah banyak diselenggarakan diberbagai daerah di indonesia. Peran tokoh masyarakat tersebut kemudian mendapat perhatian berbagai kalangan politik dan masyarakat besar yang ada di indonesia guna sebagai mesin pendongkrak suara pada setiap pemilihan umum yang digelar disetiap daerah.[12]

Pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2014 lalu dikota Palembang dilangsungkan bahwa pada pemilihan kepala daerah di kota Palembang masih kuatnya hubungan ikatan primordialisme yang sangat kental dalam melakukan suatu resume politik. Seorang tokoh masyarakat dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat.ketokohan seseorang dalam masyarakat merupakan representasi atau perwakilan kepentingan masyarakat itu sendiri, maka dari itu sesuai yang dikemukakan bahwa tokoh masyarakat ialah orang yang dianggap sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri.

Fakta objektif tersebut, beranggapan bahwa peranan tokoh masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga mengindikasikan bahwa beberapa tokoh masyarakat, diantaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pilkada yang berlangsung di kota Palembang. Tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan kepentingan dari semua elemen didalam masyarakat itu kemudian mewujud dalam rangka mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan masyarakat serta senantiasa menjadi yang terdepan dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam masyarakatnya.

2. Legitimasi Tradisi Melayu dalam Politik-Pilkada

Masuknya Islam ke wilayah kepulauan Melayu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Melayu yang kemudian identik dengan Islam. Sebab, Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu telah berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran Nasional. Syed. Muhammad Naquib al-Attas menegaskan:

> *Together with the historical factor, the religious and language factors began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the Archipelago into the modern Indonesian na-*

[12]Pernyataan Ketua Panwaslu Kota Palembang M. Taufik, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018

tion with Malay as its national language.... The coming of Islam constituted the inauguration of a new period in the history of the Malay-Indonesian Archipalego".[13]

Selain itu, Naquib al-Attas menegaskan bahwa Islam telah berjasa kepada Melayu Nusantara karena telah memberi semangat hebat yang menggerakkan proses revolusi hidup berdasarkan pandangan alam seni dan alam falsafah yang berdasarkan akal dan budi.[14]

Dalam perkembangannya, Melayu diidentikkan dengan Islam. Bahkan, Islam dan Melayu menjadi dua kata yang sering harus berjalan beriringan; Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu, sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam. Bagi komunitas Melayu, hal ini terefleksikan dalam satu istilah "masuk Melayu". Istilah ini mempunyai dua arti, yaitu: 1) mengikuti cara hidup orang-orang Melayu; dan 2) masuk Islam".[15]

Istilah ini demikian mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya akan banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu, tak terkecuali dalam mengekspresikan gagasan-gagasan tentang politik, seperti konsep kekuasaan, penguasa atau raja, hubungan penguasa dengan rakyat, serta hal-hal lain yang berada dalam ranah politik.

Maka, dapat disimpulkan bahwa orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya dengan tiga ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu, dan beragama Islam. Berdasarkan ciri-ciri pokok tersebut, masyarakat Melayu Nusantara dipersatukan oleh adanya kerajaan-kerajaan Melayu pada masa lampau. Kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu telah meninggalkan tradisi-tradisi dan simbol-simbol kebudayaan Melayu yang menyelimuti berbagai suasana kehidupan hampir sebagian besar masyarakat wilayah kepulauan tersebut. Kerajaan-kerajaan besar Melayu bukan saja terpusat di Pulau Sumatra khususnya Palembang, namun penyebarannya mencapai sebagian besar wilayah Nusantara.

Hal ini dapat saja terjadi karena adanya beberapa penguasa beserta pengikutnya dari kerajaan-kerajaan tersebut yang melarikan diri karena berbagai faktor, dan kemudian mendirikan kerajaan Melayu baru di daerah lain.

Simbol-simbol yang berasal dari kebudayaan Melayu, yang berlaku di tempat-tempat umum serta yang digunakan untuk menjembatani berbagai suku bangsa dan golongan etnis yang berbeda sehingga dapat saling berinteraksi adalah bahasa Melayu dan etika Melayu (antara lain keramahtamahan dan kerterbukaan). Dapat dikatakan, kebudayaan Melayu memiliki ciri-ciri utama yang bersifat fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan.

Ciri-ciri seperti yang dimiliki kebudayaan Melayu muncul dari pengalaman sejarah kebudayaan Melayu yang selama berabad-abad telah mengalami kontak dengan berbagai kebudayaan asing, baik yang hanya karena hubungan dagang maupun yang menetap. Karena itu, kebudayaan Melayu juga memiliki kesanggupan yang besar dalam mengambil alih unsur-unsur kebudayaan non-Melayu.

Kebudayaan Melayu yang diterima oleh semua golongan masyarakat tumbuh dari sejarah perkembangan kebudayaan Melayu itu sendiri, yang selalu berkaitan dengan tumbuh, berkembang, dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Melayu,

---

[12]http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id

[13]Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm. 178.

[14]Dr. Ustaz Haji MD. Zain Haji Serudin, Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan, (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1998), hlm. 224.

[15]Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Bahasa, (Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989). Dikutip oleh Adian Husaini, Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu, dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 55.

dengan agama Islam, perdagangan internasional, serta penggunaan bahasa Melayu. Oleh karena itu, simbol-simbol kebudayaan Melayu yang sampai sekarang diakui sebagai identitas Melayu adalah bahasa Melayu, agama Islam, serta kepribadian yang terbuka dan ramah.

"Pada dasarnya, agama Islam yang dianut oleh orang Melayu adalah Islam tarekat dan aliran yang membenarkan tetap berlangsungnya tradisi-tradisi setempat yang bernaung di bawah keagungan Islam. Tarekat Naqsabandiyah, misalnya, diperkenalkan di Riau pada abad ke-19 oleh Syeikh Ismail yang juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan intelektual di Riau. Di antara tokoh-tokoh penganut tarekat ini adalah Raja Ali YTM Riau ke-8, Raja Haji Abdullah YTM ke-9, dan Raja Ali Haji (RAH)".[16]

Selain itu, banyak raja dan pembesar Riau bersatu di bawah sebuah perkumpulan bernama Rusyidah Kelab. Perkumpulan ini telah banyak menghasilkan karya seperti Risalat al-Fawaid al-Wafiat fi Syarah Ma`ana al-Tahiyyat.[17]

Dalam agama Islam yang dianut oleh orang Melayu, terdapat variasi ajaran, yaitu perpaduan antara Islam tradisional dan Islam modern. Variasi ini mengikuti sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu yang tradisi-tradisinya masih tetap berlaku sampai sekarang dalam wilayah-wilayah bekas kekuasaan kerajaan-kerajaan yang bersangkutan.Syed. M. Naquib Al-attas mengklasifikasikan proses Islamisasi di kepulauan Melayu menjadi tiga fase: pertama, proses Islamisasi kepulauan Melayu yang dapat diamati sejak abad ke-13 dan ditandai oleh peranan fikih yang dominan dalam menginterpretasikan syari`at".[18]

Dalam fase ini, konsep fundamental mengenai keesaan Tuhan masih kabur dan dipahami secara samar-samar, yang di dalamnya terdapat sebagian konsep pandangan hidup kuno Hindu-Budha yang masih tumpang tindih, dibayang-bayangi atau dibingungkan oleh konsep baru dalam pandangan Islam. Al-Attas mengistilahkan fase ini sebagai fase sebelum periode Hamzah Fanshuri, tokoh sufi Melayu.

Fase kedua, yang diamati dari abad ke-15 hingga akhir abad ke-18, di mana penafsiran hukum-hukum agama secara umum ditandai dengan dominasi tasawuf dan kalam. Pada fase ini, beberapa konsep dasar yang masih dipahami secara kabur itu dijelaskan dan didefinisikan sehingga dapat dipahami secara transparan dan semitransparan. Yang dimaksud Al-Attas dengan transparan dan semitransparan adalah pengertian-pengertian sempurna dan parsial dari makna-makna Islami, sebab selain konsep, kata-kata tidak menjelaskan realitas objektif sesuatu yang digambarkan. Sehingga yang penting adalah memahami pengertian dasar kata-kata itu dan pengertian yang berhubungan dengannya, sebab kata-kata itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki konteks dan bidang semantik tertentu.

Fase ketiga, proses Islamisasi sebagai kelanjutan dari fase kedua. Namun, al-Attas mengingatkan bahwa proses-proses ini tidak semestinya dilihat secara terpisah, seperti satu fase berlangsung ketika fase yang lain berhenti.[19] Dengan demikian, proses Islamisasi kepulauan Melayu merupakan sebuah fenomena sejarah yang universal. Maka, untuk memahami Islam di dunia Melayu berarti harus memahami Islam itu sendiri sebagai sebuah agama dan peradaban.[20]

Bangsa Melayu selanjutnya menjadikan Islam sebagai landasan dasar perumusan etika bagi perilaku politik para penguasa di kerajaan. Gambaran tersebut, misalnya, tampak dalam pembahasan teks-teks Melayu Klasik, seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-raja Pasai dua teks yang masing-masing berbicara tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Melaka abad 14 dan

[16]Abu Hassan Sham, Puisi-puisi Raja Ali Habsi (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), hlm. 64

[17]Ibid

15 di mana perumusan Islam sebagai basis etika politik terlihat dengan jelas pada isu-isu pokok politik yang mengemuka dalam keseluruhan isi pembahasan. Merah Silu, salah seorang Raja Pasai misalnya, digambarkan bahwa sesaat setelah beralih ke agama Islam ia segera memakai gelar Arab yaitu Sultan, dan dalam suatu sidang dengan para pimpinan dan rakyatnya, ia dinyatakan sebagai "Bayang-bayang Tuhan di Bumi" (Zillullah fil Alam).[21]

3. Pentingnya Tradisi Melayu dalam Politik Pilkada

Tradisi politik melayu adalah politik yang beretika, memiliki moral dan tidak menghalalkan berbagai cara dalam mencapai tujuan keinginannya. Dalam sejarah telah membuktikan bahwa kepemimpinan raja atau sultan di masyarakat Melayu pernah mengalami masa keemasannya. Ifat berdagang yang dijalankan oleh orang-orang Melayu mampu merambah berbagai belahan bumi pada zamannya. Bahkan pada era Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, kerajaan Aceh masuk dalam lima kerajaan terbesar di dunia.

Dahulu pada kerajaan Sriwijaya, dengan rajanya Dharmasraya, yang menaungi wikayah Malayu-Jambi, Aceh dan Malaka diakui oleh dunia pada masanya dengan kebesaran budaya dan peradabannya serta kekuasan wilayah yang dimiliki. Semua itu tidak bisa terjadi kecuali kepemimpinan dalam tradisi Melayu saat itu sudah memiliki jati diri yang kuat, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, berdaya tahan tinggi dan berperan aktif dalam kesinambungan kehidupan bangsa.

Menurut Bursya Syarnubi bahwa sejarah negeri Melayu banyak mencatatkan kearifan bidang kepemimpinan dalam perspektif budaya Melayu. Sehingga ditengah krisis kepemimpinan yang melanda negeri ini, sebenarnya tradisi budaya Melayu sejak dahulu telah menawarkan model kepemimpinan yang sesuai di Indonesia khususnya dalam persoalan-persoalan politik yang sering dihadapi saat ini. Juga jika melihat kareakter pemimpin ideal yang ada dalam tradisi budaya Melayu, maka akan sangat sesuai dengan model kepemimpinan transformasional pada zaman sekarang. Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan nilai-nilai yang sesuai bagi proses perubahan, seperti sifat jujur, keadilan dan tanggung jawab. [22]

Model kepemimpinan dalam tradisi Melayu, saat ini sering sederhanakan dengan istilah model kepemimpinan transformasional di era kontemporer. Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Dalam pendapat lain, kepemimpinan transformatif didefinisikan sebagai kepemimpinan dimana para pemimpin menggunakan kharisma mereka untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi organisasinya. Para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para pengikutnya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top-down.

Jadi model kepemimpinan tradisi Melayu masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, karena model kepemimpinan tradisinya adalah transformasional, yang diharapkan bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Pada khazanah politik Melayu, pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan untuk mengurusi kepentingan orang banyak. Arti raja atau penguasa bagi orang Melayu dimaknai lewat pepatah lama berikut ini:

---

[18]Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 319-320.

[19]http://mujahidinmudaa.blogspot.com/2014/04/sistem-politik-ekonomi-dan-sistem.html

[20]Ibid., h: 323

[21]Oman Fathurrahman, "Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap", www.islamlib.com.

Yang didahulukan selangkah
Yang ditinggikan seranting
Yang dilebihkan serambut
Yang dimuliakan sekuku [23]

Pepatah tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang raja haruslah sosok manusia yang dapat dijangkau oleh rakyat biasa. Penguasa harus berada di tengah-tengah rakyatnya, mengerti kondisi warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Raja bukanlah dewa yang tak tersentuh oleh manusia, melainkan sosok yang hanya diberi beberapa kelebihan seperti di atas.

Jadi, eksistensi suatu negara ditentukan oleh tiga hal penting yaitu pemimpin, rakyat dan wilayah. Pada masa lampau kerajaan-kerajaan juga mensyaratkan adanya pemimpin atau raja. Oleh sebab itu keberadaan raja adalah sebuah keniscayaan. "Raja itu umpama akar, dan rakyat adalah pohon. Jikalau tidak ada akar, maka pohon tidak dapat berdiri". Sebuah ungkapan mengenai pentingnya seorang pemimpin. Dan pada masa kerajaan Melayu terdapat raja-raja yang berjaya dan mampu membawa kerajaannya pada masa keemasan.

Dalam tradisi orang Melayu, para pemimpin itu adalah manusia-manusia yang lebih daripada yang lain, kuat, gigih, dan tahu tentang banyak hal. Bahkan di masa lalu, seorang pemimpin bangsa Melayu juga haruslah sosok yang sakti mandraguna demi melindungi wilayah dan rakyatnya dari ganguan binatang buas, penjahat, penjajah dan makhluk halus (jin, siluman, setan, dll). Karena itulah, para pemimpin yang sejati juga merupakan manusia-manusia yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam suatu komunitas orang Melayu menjadi penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai bersama.[24]

Untuk itu, salah satu sumbangan terbesar dari kebudayaan Melayu adalah turut mewujudkan dan membentuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Dan tak berlebihan apabila akhirnya kebudayaan Melayu disebut sebagai akar dari jati diri bangsa ini. Pengaruh Melayu bagi bangsa Indonesia pada umumnya meliputi banyak hal, di antaranya adalah khazanah dalam budaya politiknya.

Kepemimpinan Melayu, baik Melayu Tua (pra-Hindu-Buddha-Islam) maupun Melayu Muda (era Hindu-Buddha-Islam) terdiri dari pemangku adat (sebagai pemimpin formal) disamping tokoh tradisi seperti dukun atau orang pintar sebagai pemimpin informal. Untuk Melayu Tua (Pra Hindu-Buddha-Islam), maka lebih jelasnya kami berikan contoh struktur kepemimpinan formal yang ada pada masyarakat Kerinci kuno.[25]

Dalam perkembangan masyarakat Melayu, ulama dikategorikan sebagai elit tradisional yang telah dan sedang memainkan peranan penting dan strategis. Secara historis-sosiologis, ulama di Indonesia telah memainkan berbagai peranan; politik, social kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan tentu saja yang terpenting, keagamaan. Pada masa kesultanan, para ulama memainkan peranan penting dan bahkan menentukan dalam pemerintahan, selain bidang keagamaan. Penguasa baru (sultan) biasanya sangat mengandalkan legitimasi dari ulama yang menobatkan sultan tersebut sebagai penguasa baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang keagamaan.

Ulama kemudian ditarik masuk ke dalam sistem administrasi pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab mengurus lembaga keagamaan yang dikenal dengan istilah kepenghuluan. Sementara sebagian ulama tetap men-

[22]Hasil wawancara dengan Bapak Bursya Syarnubi, seorang tokoh budaya di kota Palembang dan merupakan Politisi di Sumatera Selatan, di Palembang pada tanggal 18 Maret 2018

[23]http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id

jalankan tugas-tugas keagamaan dan pendidikan kepada masyrakat secara independen. Dengan demikian, dari segi fungsinya ulama di Indonesia telah terbagi kepada dua kategori, yakni ulama bebas dan ulama birokrat atau ulama penghulu. Ulama bebas menggeluti jalur akidah dan tasawuf yang pengejawantahannya berbentuk al-da'wah wa altarbiyah yakni dakwah dan pendidikan, sedang ulama penghulu bergerak pada jalur ilmu fi qh yang manifestasinya berbentuk altasyri' wa al-qadha yakni tata hukum perundangan dan peradilan.

Ulama bebas secara umum berperan dalam bidang dakwah dan pendidikan sedang ulama penghulu atau ulama pejabat secara menonjol berperan dalam bidang pelaksanaan hukum Islam. keduanya bersifat saling melengkapi dalam penyebaran Islam. Ulama bebas memiliki tugas utama sebagai guru, pengajar dan mubaligh untuk menanamkan pemahaman Islam kepada masyarakat. Ulama ini mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Islam di daerah-daerah pedesaan.

Di Jawa, lembaga pendidikan Islam tersebut disebut Pesantren, di Minangkabau Surau, dan di Aceh Meunasah. Ulama penghulu bertugas menerapkan syari'at Islam baik di pusat kesultanan maupun di daerah-daerah. Dengan demikian, jabatan penghulu tersebut tersebar tidak hanya di lingkungan keraton tetapi juga sampai di desa-desa. Ulama pejabat dipanggil dengan sebutan yang beragam di berbagai daerah. Masyarakat Islam Sunda menyebutnya "Penghulu", orang Jawa menyebutnya "Pengulu", orang Madura memanggilnya "Pangoloh" sementara orang Melayu memanggilnya "Penghulu".[26]

Pada masa kolonial, dua fungsi ulama tersebut terus berlangsung. Pemerintah kolonial tetap mempertahankan kedudukan dan fungsi ulama penghulu dengan melakukan perubahan-perubahan tertentu. Salah satu perubahan itu adalah mengenai keharusan mengikuti ujian bagi calon penghulu dan syarat-syaratnya pun ditambah terutama pengusaan Bahasa Latin. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan penghulu menjadi kewenangan pemerintah kolonial sehingga tidak jarang terjadi ketidak-proporsional.

Wewenang ulama penghulu juga dikurangi, misalnya dengan pembentukan pengadilan negeri (landraad) meskipun dalam kenyataannya penghulu tetap menangani perkara yang berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum waris.[27]

Pada masa lalu, ulama dikenal pula sebagai kaum intelegensia dan elite ilmu agama Islam. Mereka tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan dan menjalankan dakwah ke daerah-daerah tetapi juga menulis ide dan pemikirannya dalam bentuk buku-buku (kitab). Seperti; Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, Syamsuddin al-Sumatrani, Abdurrauf al-Sinkili dari Aceh, Abdussamad al-Palinbani dan Muhammad al-Azhari alPalimbani dari Palembang, Arsyad al-Banjari dan Nafi s al-Banjari dari Banjar, dan Nawawi dari Banten. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam yang dikembangkan oleh para ulama Indonesia merupakan tradisi keilmuan khas Indonesia.

Para ulama tentu saja berperan penting dalam bidang sosial dan kebudayaan (dalam pengertian yang luas). Dalam hal ini ulama merupakan golongan yang berperan dalam pembentukan sistem nilai, sistem kelembagaan, dan perilaku masyarakat. Secara histories, pendirian lembaga pendidikan Islam biasanya dilakukan dengan

[24]http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-sriwijaya.html
[25]http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-sriwijaya.html
[26]http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-sriwijaya.html

[27]Daniel S Lev, Islamic courts in Indonesia A Study in the Political Bases of Legal Institutions, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972), h. 10.

membuka lahan baru sehingga memungkinkan munculnya pemukiman baru dan transmigrasi lokal.

Dalam bidang kebudayaan, para ulama telah mengembangkan sistem budaya ilmu yang unik. Keunikannya adalah bahwa para ulama, dalam melakukan pendidikannya, mengarahkannya kepada pendidikan kerakyatan. Lembaga pendidikan yang diselenggarakannya merupakan center of excellence di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Orientasi pendidikan yang dikembangkan para ulama sama sekali tidak bersifat elitis tetapi bersifat kerakyatan. Para ulama telah menanamkan budaya ilmu kepada lapisan masyarakat yang paling bawah.8 Dengan demikian para ulama telah melahirkan sistem budaya kerakyatan dan menyiapkan budaya swasta dan wiraswasta.

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta dakwah Islam mereka tidak mengharapkan dan mendapat gaji dan tidak pula mereka mengarahkan peserta didiknya menjadi pegawai. Karena itu, posisi ulama sebagaimana tersebut, oleh para antropolog-sosiologi adalah sebagai "cultural broker" (pialang budaya), bahkan sebutan entrepreneur juga disematkan padanya.

4. Pengaruh KeterlibatanTokoh Melayu dalam Pelaksanaan Pilkada

Latar Belakang Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) langsung lantaran diperintahkan oleh undang-undang yang merupakan salah satu bentuk sistem negara demokrasi yang dianut Indonesia, pemilu langsung ini yang tampil dihadapan kita sejak masa 2005 lalu. Pemilukada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari Walikota, Bupati hingga Gubernur.

Berbeda dengan pilkada langung tidak serentak yang diselenggarakan pada periodesasi sebelumnya, maka pilkada langsung secara serentak mempunyai ciri-ciri khas tersendiri diantaranya, untuk kali pertama diselenggarakannya pemilihan dengan pasangan calon (Paslon) tunggal, dibebankannya pembiayaan kampanye paslon kepada Negara (KPUD) serta pemilihannya bersifat seretak dalam arti waktu penyelenggaraan Pilkada di satu daerah sama dengan di daerah lain. Pilkada serentak ini direncakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Selain mempunyai kekhasan, kehadiran pilkada serentak diharapkan memperbaiki kelemahan-kelemahan pilkada tidak serentak, yaitu terciptanya keselarasan pembangungan antara pemerintah daerah dengan pusat, meminimalisasi biaya politik serta efisiensi penyelenggaraannya. Tetapi lebih dari itu, menurut pandangan salah satu Tokoh Melayu, adalah "apakah pelaksanaan pilkada langsung serentak tersebut berkolerasi terhadap peningkatan praktek-praktek demokrasi secara substansial. Ketika pilkada langsung dilaksanakan secara periodik dan dilaksanakan oleh penyelennggara pemilu yang independen dan pemilihannya melibatkan rakyat sebagai pihak yang paling menentukan bagi keterpilihan seseorang sebagai kepala daerah, maka sesungguhnya pelaksanaan pilkada tersebut adalah cermin dari praktek demokrasi prosedural."

Tetap pelaksanaan demokrasi yang bersifat prosedural, belumlah cukup untuk menjamin dan meneguhkan kuliatas demokrasi itu sendiri ataupun untuk menciptakan kehidupan rakyat yang lebih baik. Untuk itu, pilkada langsung haruslah merupakan implementasi dari praktek dan kehidupan demokrasi secara substansif. Beberapa parameter yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah kehadiran pilkada serentak merupakan praktek dan dapat mengembangkan demokrasi secara substansif diantaranya, penguatan politik kewarganegaran. Politik kewargaaan adalah sebuah kehiduapn politik yang memberikan hak untuk mengaktualisasikan hak-hak dan kewajibannya se- bagai warga negara.

Dalam konteks ini, pilkada serentak harus memberi tempat kepada rakyat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan diskursus pilkada. Dengan mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang pilkada (termasuk rekam jejak calon), maka rakyat (warga negara) dapat menentukan sikap dan pilihan politik secara rasional dalam upaya untuk menentukan masa depannya (kemajuan daerah).

Selain adanya informasi yang menyeluruh yang harus diterima oleh warga negara, maka demokrasi substansif mempersyaraktan tidak adanya praktek-praktek intimidasi terhadap pilihan politik rakyat. Dengan adanya politik intimidatif sama artinya dipasungnya hak rakyat untuk mengaktualisasikan pilihannya secara bebas dan bermartabat. Penerapan demokrasi secara substansif dalam bentuk lainnya adalah dihilangkannya politik uang dalam pilkada serantak. Politik uang selalu menjadi persoalan yang terus terjadi dalam pemilihan pejabat publik. Dalam prakteknya politik uang dilaksanakan dalam beberapa hal seperti, pemberian uang ataupun barang kepada pemilih untuk memilih ataupun tidak memilih paslon, menjanjikan sesuatu kepada pemilih bila ia mengi- kuti kemauan paslon, memberikan bantuan sosial kepada pemilih dalam upaya untuk mempergaruhi pilihan politik serta membeli rekomendasi pencalonan dari partai politik.

Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan politik tanpa maharnya, yaitu tidak memungut biaya kepada paslon yang diusung dan didukungnya, harus menjadi tradisi baru yang ditiru dan dikembangkan secara terus-menerus oleh semua elemen bagsa ini. Politik tanpa mahar sekaligus merupakan pengejawantahan dari politik tanpa transaksi, sekaligus merupakan wujud dari politik gagasan dari Partai NasDem. Politik gagasan adalah sebuah politik yang lebih mnegedapankan pada visi-misi, kompetensi, nilai, ide daripada kecenderungan untuk melakukan politik yang mengedepankan untung rugi.

Sebagaimana dikatakan Muhammad Hasan, Ketua DPD Partai NasDem Kota Palembang, karena berpedoman pada politik gagasan, maka dukungan Partai NasDem pada paslon, lebih disebabkan karena rekam jejak, visi misi dan kompetensi dan pengalamannya selama bergelut jabatan publik daripada karena faktor modal materi yang dimiliki oleh paslon.

Dengan politik tanpa mahar ini, maka dapat menekan biaya politik yang dikeluarkan paslon. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan, akan membuatnya semakin tidak merasa terbebani dengan mengembalikan modal yang dikeluarkan, maka dengan demikian, diharapkan selama menjalankan kepemimpinannya ia akan lebih memperjuangkan kepentingan rakyat. Pilkada serentak akan semakin mencerminkan demokrasi secara substansial apabila melahirkan pemimpin yang selalu berpihak pada kepen- tingan rakyat. Selain mempunyai keberpihakan pada rakyat, pemimpin tersebut akan terus-menerus untuk mendengarkan aspirasi dan usulan yang dimunculkan dari bawah. Dari pendekatan yang bersifat bottom up ini kemudian lahirlah sebuah kebijakan dan keputusan politik yang mengartiklasikan suara rakyat.

Selain mempunyai kepekaan terhadap kepentingan rakyat, maka seorang pemimpin yang mengimplementasikan praktek demokrasi adalah bila ia tidak alergi terhadap kritik yang konstruktif bagi kemajuan pembangunan daerah. Dalam hal ini pemimpin tidak merasa bahwa pendapatnya adalah selalu benar, tetapi dia harus menyakini bahwa terdapat pendapat alternatif dari rakyatnya yang dapat menjadi input bagi pengambilan keputusan.

Secara ideal, pemimpin di daerah harus selalu mengedepankan kejujuran, tranpanransi dalam menentukan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Selain itu segala tindakan yang di-

ambil harus accountable kepada publik, dengan demikin sama artinya menempatkan rakyat sebagai peme- gang kedaulatan terttinggi dalam persoalan publik.

Yang tidak kalah penting, pilkada serentak haruslah menjadi jembatan (bridging) bagi peningkatan kesejateraaan rakyat. Hal ini dapat tercapai bila output yang dihasilkan pilkada tersebut melalahirkan pemimpin yang dapat membawa daerahnya menjadi gema ripoh lah jenawi, baldatun toyyibatun wa robbun ghofur, sebuah daerah yang hidup dalam penuh keadilan, dengan rakyat yang sejahtera dan makmur. Pemimpin daerah harus menjadi leader yang dapat menggerakkan rakyat untuk bersama-sama dengan pemimpin berkontribusi bagi kemajuan daerah. Pemimpin yang baik adalah dapat meningkatkan partispasi dan kreasi warga dalam upaya untuk terciptanya kesejahteraan warga.

Selain itu, salah satu yang menjadi ukuran dari terlaksananya demok- rasi secara substansial adalah penyelenggaaraan pilkada dilaksanakan secara jujur dan adil. Sebagai penyelenggara, KPUD dan Panwaslu harus selalu menjaga obyektifitas dan netralitas. Penyelenggara pemilu harus tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, karena akibat kesalahan menjalankan tugas karena "disengaja: akan berujung pada timbulnya konflik horizontal ataupun vertikal. Pada kenyataaanya, tahapan pelaksanaannya di 2018 ini, di sejumlah daerah terjadi ketidakpuasan terhadap profesionalitas penyelenggaara pilkada. Profesionalitas penyelenggara akan mempengaruhi kualitas dari pilkada itu sendiri. Semakin kualitas penyelenggaraan pilkada, maka secara normatif akan menghasilkaan pemimpin yang semakin berkualitas pula.

Pilkada serentak ini diharapkan menjadi exercise dan percontohan bagi penyelanggaraan pemilu berikutnya. Karena itu, pengalaman pertama menyelenggarakan pilkada secara serentak diharapkan dapat menjadi blue print bagi bangsa ini untuk memperoleh sesuatu yang ideal. Maka tidak mungkin agar tercipta penyelenggaraan yang ideal yang kemudian akan menjaddi pattern di masa mendatang, beban untuk menyukseskannya hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu.

Kesuksesan pilkada serentak tidak bisa ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi oleh stakeholders yang terkait seperti, pemerintah, aparat hukum/ keamanan maupun partai politik. Pemerintah menjadi penting bagi terselenggaranya pilkada yang sesuai dengan harapan. Pemerintah menjadi faktor determinan, karena pada kenyataaannya, merekalah yang mempunyai kewenangan untuk mengoptimalkan pendanaan yang dibutuhkan bagi kesuksesan pilkada. Tanpa adanya kualitas pendanaaan yang optimal, maka kualitas pennyelenggaran pilkada akan jauh dari memuaskan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan aparat hukum/keamanan untuk mengawal pikada dengan terselenggara secara kondusif dan tidak berimpilkasi terjadi konflik di masyarakat. Kesiapan aparat hukum/ keamaanan untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak ter jadi persoalan-persoalan yang di luar dugaan. Netralitas aparat hukum/ keamanan menjadi sesuatu yang penting dalam upaya menciptakan pilka da yang berkualitas.

Yang juga tidak boleh dilupakan adalah peran parpol untuk menjadikan pilkada serentak ini berkualitas dan penuh integritas. Parpol menjadi instrumen penting bagi pendewasaan politik pemilih. Dalam tradisi patronclient yang masih berkembang di Indonesia ini, parpol dapat memfungsikan dirinya untuk selalu aktif mengawal agar pilkada berlangsung secaraa harmoni, tanpa caci maki dan selalu berjalan dalam praktek-praktek kesantunan. Sebagaimana yang dikatakaan oleh Surya Paloh, bahwa tugas parpol adalah menciptakaan iklim yang kondusif, situasi sejuk dan pikiran yang jernih dalam pe-

nyelenggaraan pilkada ini.

Bagi partai politik peserta pemilu dan mempunyai kursinya di DPRD, telah terjadi pergeseran mekanisme dari sistem perwakilan dimana pada waktu itu anggota DPRD memilih kepala daerah menjadi ke sistem pemilihan langsung, masyarakat memilih kepala daerahnya, telah mengharuskan institusi partai politik melakukan pembenahan dalam strategi pendekatannya untuk menggapai ke kursi kekuasaan (eksekutif). Hal ini dikarenakan pemilih bukan lagi diranah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan masyarakat langsung yang terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Selatan yang ikut melaksanakan Pemilukada. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan diantara partai politik di kota Palembang, faktor adat dan tokoh lokal cukup berperan. Semakin jauh dari pusat, maka partai yang tidak memiliki tokoh populer peluangnya dalam Pemilu semakin berat. Sementara tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Di era otonomi sekarang, tokoh lokal cukup berpengaruh kepada para pemilih.

Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang.[28]

Dari pengamatan penulis dilapangan, diketahui banyak para tokoh ulama maupun tokoh masyarakat yang dijadikan tim sukses maupun pendukung utama dari tiap-tiap pasangan calon walikota/wakil waliikota Palembang. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Edwar Zombi, H. Marzuki (Wak Gajah), H. Syamsuri (H.Sym). Dari tokoh yang terlibat diketahui bukan hanya sekedar menjadi tokoh panutan masyarakat, namun juga memiliki basis masa yang besar seperti Edwar Zombi yang pada awalnya mendukung pasanan Sarimuda, beralih mendukung pasangan yang lama yaitu harnojoyo. Dengan memiliki kekayaan intelektual dan keberhasilan yang dimiliki seorang tokoh masyarakat, mereka dianggap memiliki peran yang penting dalam menunjang pendulangan suara pasangan calon.

Ada beberapa fenomena politik di kota Palembang yang dilakukan oleh tokoh Budaya Palembang. Geopolitik Palembang tentu tidak bisa dipisahkan dari peran orang-orang sekitar. Bahwa Palembang adalah negeri ulama dan agamis, untuk itu sebabnya tokoh Nahdatul Ulama seperti KH. Muddaris, Dr. H. Ali Masykur Musa dan Ketua PC NU Kota Palembang KH. Rosidin Hasan yang disebut-sebut mayarakat Palembang sebagai tokoh sentral dalam memperjuangkan terbentuknya pemimpin muslim yang peduli dengan Islam.

Tokoh sentral yang dimaksud adalah suatu ketokohan yang berperan sangat penting dalam kepemimpinan umat dan pembangunan kota Palembang dan pernah memegangi jabatan yang strategis. Pemilukada Kota Palembang 2018-2023 dipengaruhi berbagai Dinamika Peristiwa politik dalam Pemilukada Kota Palembang .

Dari lapisan masyarakat yang berbeda tersebut maka semakin beragam pemikiran serta pemahaman masyarakat terhadap hadirnya tokoh-tokoh politik yang ikut serta dalam Pilkada Kota Palembang. Untuk bisa berperanan dan berpartisipasi secara maksimal dan berkelanjutan dalam pembangunan Kota Palembang diperlukan setiap warga khususnya pada warga kota Palembang meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian terhadap Kota Palembang dan menghargai setiap perbedaan pandangan yang

[28]Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim, 2017, Sejarah tokoh Budaya dan Tokoh Agama Sumatera Selatan. Serunting Press, Palembang, hal. 26

ada.

Para tokoh Nahdatul Ulama Palembang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mampu untuk mendorong masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena indikator suksesnya pemilukada antara lain besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Semakin besar keikutsertaan masyarakat dalam pemilukada, semakin besar legimasi pemilukada dan Walikota/wakil walikota terpilih. Peranan tokoh Nahdatul Ulama menjadi amat strategis karena berada digarda terdepan dalam masyarakat. Beliau sangat diperlukan untuk berperanan dan berpartisipasi memecahkan berbagai persoalan di masyarakat dalam lingkup Kota Palembang.

Kesimpulan

Keterlibatan tokoh Melayu dalam pemilihan kepala daerah 2018 di Kota Palembang merupakan tokoh melayu yang ada di Sumatera Selatan yang ikut melaksanakan Pemilukada. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan diantara partai politik di kota Palembang, faktor adat dan tokoh lokal cukup berperan. Semakin jauh dari pusat, maka partai yang tidak memiliki tokoh populer peluangnya dalam Pemilu semakin berat. Sementara tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Di era otonomi sekarang, tokoh lokal cukup berpengaruh kepada para pemilih.Tokoh masyarakat melayu merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang.

Peran keterlibatan tokoh budaya Melayu terhadap elektabilitas calon Kepala Daerah di Kota Palembang, diketahui banyak para tokoh ulama maupun tokoh masyarakat yang dijadikan tim sukses maupun pendukung utama dari tiap-tiap pasangan calon walikota/wakil walikota Palembang. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Edwar Zombi, H. Marzuki (Wak Gajah), H. Syamsuri (H.Syam). Dari tokoh yang terlibat diketahui bukan hanya sekedar menjadi tokoh panutan masyarakat, namun juga memiliki basis masa yang besar seperti Edwar Zombi yang pada awalnya mendukung pasanan Sarimuda, beralih mendukung pasangan yang lama yaitu harnojoyo.Politik lokal kian berkembang sebagai kekuatan bak bola salju yang kian lama kian berkembang sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi sistem perpolitikan baik di level daerah maupun di level yang lebih besar yaitu nasional.

Daftar Pustaka

Amrianto. “Peranan Elit Tradisional dalam Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014” https://media. neliti.com/media/publications/1145-ID-peranan-elit-tradisional-dalam-dinamika-politik-lokal-pada-pemilihan-kepala-daer.pdf, diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

Prihatmoko, JokoJ. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: LP3M, 2005.

Purwoko. Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian. (terj.), Jakarta: LP3ES, 2003.

http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id

http://mujahidinmudaa.blogspot.com/ 2014/ 04/ sistem-politik-ekonomi-dan-sistem. html

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001.

https://www.neliti.com/publications/1015/

evaluasi-peran-tokoh-masyarakat-terhadap-partisipasi-politik-pada-pemilihan-bupa

http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.

Serudin, Zain Haji. Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1998.

Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Bahasa, Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989.

Husaini, Adian.Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu, dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Sham, Abu Hassan.Puisi-puisi Raja Ali Habsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993.

Wan Daud,Wan Mohd Nor.Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, Bandung: Mizan, 2003.

http://mujahidinmudaa.blogspot.com/2014/04/sistem-politik-ekonomi-dan-sistem.html

Fathurrahman, Oman. "Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap", www.islamlib.com.

http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id

http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-sriwijaya.html

S Lev,Daniel.Islamic courts in Indonesia A Study in the Political Bases of Legal Institutions, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.Sejarah tokoh Budaya dan Tokoh Agama Sumatera Selatan. Serunting Press, Palembang. 2017.